

KONSEP, INDEKS, PENDEKATAN DAN STRATEGI KETAHANAN PANGAN

Suci Frisnoiry¹, Indah Aulia Pratiwi², Nafa Cleo Wulandari Tarigan³, Raysah Puteri Sulaiman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

Email: sucifrisnoiry@unimed.ac.id¹, indahaulia478@gmail.com²,
nafatarigan99@gmail.com³, raysahputeri2506@gmail.com⁴

Abstrak: Pangan adalah kebutuhan dasar agar manusia dapat bertahan hidup dan beraktivitas, sementara ketahanan pangan merupakan keadaan dimana manusia untuk hidup sehat dan bekerja terjamin. Pemahaman dari berbagai aspek ketahanan pangan adalah hal penting dalam mengawali jenis studi ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep, indeks, pendekatan dan strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Kajian dilakukan dengan studi literatur dari berbagai tulisan dan hasil penelitian terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Konsep ketahanan pangan sangat luas dan beragam; (2) Indeks ketahanan pangan dikembangkan dengan acuan dari *Global Food Security Index* (GFSI) (3) Untuk mencapai ketahanan pangan, perlu mempertimbangkan pendekatan ketersediaan pangan dan kepemilikan dan diperlukan paradigma baru untuk ketahanan pangan berkelanjutan

Kata Kunci: Konsep Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Pangan, Strategi Ketahanan Pangan

Abstract: Food is a basic need for humans to survive and carry out activities, while food security is a condition where humans can live healthily and work securely. Understanding the various aspects of food security is important in initiating this type of study. This article aims to examine concepts, indices, approaches and strategies for achieving food security. The study was carried out by studying literature from various writings and related research results. The results of the study show that: (1) The concept of food security is very broad and diverse; (2) The food security index was developed with reference to the *Global Food Security Index* (GFSI) (3) To achieve food security, it is necessary to consider approaches to food availability and ownership and a new paradigm is needed for sustainable food security.

Keywords: Food Security Concept, Food Security Index, Food Security Strategy

PENDAHULUAN

Kehadiran ketahanan pangan dianggap penting dan strategis, sebagaimana disorot oleh banyak negara yang menekankan bahwa stabilitas pembangunan suatu negara tidak akan terwujud sepenuhnya sebelum aspek ketahanan pangan diprioritaskan dengan serius. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal krusial bagi setiap negara dalam memastikan kelangsungan hidup masyarakatnya. Hal ini diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

dalam mencapai ketahanan pangan bagi semua warga Indonesia. Mengingat populasi Indonesia yang besar dan pertumbuhannya yang cepat, tantangan dalam mencapai ketahanan pangan menjadi prioritas utama demi kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan ketersediaan, stabilitas, dan pola konsumsi pangan menjadi hal yang sangat penting. Untuk mengawasi hal tersebut, pemerin membentuk Badan Pangan Nasional melalui Perpres No 66 Tahun 2021. Pemahaman mendalam tentang arti, aspek, tujuan, dan faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan menjadi kunci dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu utama dalam agenda pembangunan global saat ini. Di tengah tantangan seperti perubahan iklim, kerawanan terhadap bencana alam, dan pertumbuhan populasi yang cepat, memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi semua orang menjadi prioritas yang mendesak. Konsep ketahanan pangan melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan kalori, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di tengah gejolak era globalisasi dan persaingan sengit di pasar internasional, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam merancang kebijakan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Salah satu aspek dari kebijakan pangan tersebut adalah usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan berbagai jenis komoditas pangan serta mendorong diversifikasi dalam pola konsumsi pangan. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, langkah-langkal untuk memperkuat ketahanan pangan mengharuskan penggunaan berbagai sumber daya untuk menghasilkan produk pangan yang dapat bersaing dalam hal barga dan kualitas terhadap barang impor. Dalam situasi semacam ini, produksi pangan harus mengarah ke pasar internasional sebagai fokus utamanya.

Pentingnya peningkatan ketahanan pangan tergambar dalam kebutuhan yang mendasari keberlangsungan hidup manusia. Pangan, sebagai unsur pokok, memiliki peran sentral dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Definisi ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang memadai, distribusi yang merata, harga yang terjangkau, dan keamanan konsumsi bagi semua individu. Hal ini berlaku baik pada tingkat rumah tangga maupun skala nasional (Anonymous, 1999). Departemen Pertanian, dalam pendekatannya terhadap kebijakan pembangunan, mengartikan ketahanan pangan melalui dimensi ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan. Selain dari segi produksi, aspek ketahanan pangan juga menuntut pendapatan yang memadai bagi masyarakat guna mengakses pangan, keamanan pangan, serta distribu yang merata.

Dengan berbagai upaya yang diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan, serta kompleksitas permasalahan yang terkait, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek tentang ketahanan pangan, berdasarkan urgensi yang diperlukan. Melalui studi pustaka dari berbagai hasil penelitian dan tulisan yang relevan dengan permasalahan ketahanan pangan, aspek-aspek yang mencakup konsep, indeks, dan pendekatan serta strategi untuk mencapai ketahanan pangan telah dikaji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang melibatkan serangkaian langkah seperti pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, analisis teks, dan pengelolaan informasi yang relevan. Melalui proses ini, peneliti mengumpulkan dan menyusun jurnal, buku, dan sumber penelitian lain yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Tujuan utama dari studi literatur ini adalah untuk membangun landasan teori yang kuat dan kerangka berpikir yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, proses studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang terkait dengan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa dari tingkat nasional hingga individual, kebutuhan pangan tercukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas (aman, beragam, dan bergizi). Pentingnya pangan yang tersedia juga harus disertai dengan distribusi yang merata dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian ketahanan pangan tidak hanya ditinjau dari aspek nasional, tetapi juga harus diperhatikan hingga tingkat propinsi, kabupaten/kota, bahkan hingga pada tingkat rumah tangga dan individu (Tono, 2023). Pendekatan ini menekankan pentingnya penanganan ketahanan pangan secara menyeluruh dan berjenjang, untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang berkualitas.

Data untuk studi literatur dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal, artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisisnya melibatkan beberapa langkah: Pertama, peneliti mulai dengan mencari bahan yang paling sesuai dengan topik yang dibahas, dengan memperhatikan tingkat relevansinya. Kedua, peneliti membaca abstrak dari setiap karya untuk menilai apakah isu yang dibahas sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga, peneliti mencatat informasi yang penting dan relevan sesuai dengan permasalahan penelitian mereka. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa data yang

digunakan dalam studi literatur benar-benar mendukung dan relevan dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan, yang merupakan istilah terjemahan dari *food security*, memiliki banyak dimensi dan kompleksitasnya, sehingga setiap individu berupaya untuk menginterpretasikannya sesuai dengan kebutuhan dan data yang tersedia. Seperti yang disoroti oleh Reutlinger (1987) konsep ketahanan pangan dapat dipahami dengan beragam pendekatan dan sudut pandang. Braun dkk (1992) turut menyoroti bahwa istilah "ketahanan pangan" seringkali menjadi sumber perdebatan dan kebingungan karena cakupan dan kompleksitasnya yang luas, meskipun sekaligus menjadi salah satu konsep yang sangat krusial bagi masyarakat global. Selain itu, mereka juga mencatat bahwa definisi ketahanan pangan telah mengalami evolusi dari satu periode ke periode lainnya. Pada dekade 1970-an, sorotan lebih banyak tertuju pada ketersediaan pangan secara global dan nasional daripada pada tingkat rumah tangga. Namun, pada dekade 1980-an, fokus perhatian terhadap ketahanan pangan bergeser ke arah akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu.

Awalnya, pertanyaan seputar ketahanan pangan masih berkisar pada "Dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup?". Kemudian, *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) mempertajam pertanyaan tersebut menjadi "Dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau oleh kelompok miskin?". Namun, sejak awal 1990-an, pertanyaan tersebut telah menjadi lebih lengkap dan kompleks, yakni: "Dapatkah dunia memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau oleh kelompok miskin serta tidak merusak lingkungan hidup?". Secara umum, ketahanan pangan berarti akses pangan terjamin bagi seluruh rumah tangga dan individu setiap saat sehingga mereka dapat bekerja dan hidup sehat (Braun dkk., 1992; Suhardjo, 1996, Soetrisno, 1997).

Pembahasan tentang ketahanan pangan pada dasarnya juga melibatkan faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak mencukupi kebutuhan pangan mereka. Faktor-faktor tersebut mencakup tersedianya pangan, lapangan kerja, dan pendapatan. Ketiga faktor tersebut menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki ketahanan pangan, yang berarti mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya (Sumarwan, dan

Sukandat, 1995). Keseimbangan dan keserasian antara kebijaksanaan di bidang sosial seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, gizi, dan lain-lain akan diatur oleh pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM). Hal ini karena persediaan pangan yang cukup berpengaruh pada harga pangan, seperti yang diungkapkan oleh Soekirman (1996), ancaman terhadap ketahanan pangan keluarga muncul ketika harga pangan naik bagi keluarga yang tidak bekerja atau yang bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Di sisi lain, tanpa daya beli yang memadai, banyak penduduk tanpa pekerjaan dan tanpa pendapatan juga mengakibatkan tidak efektifnya persediaan pangan.

Dasar-dasar ketahanan pangan yang menjamin kecukupan ketersediaan pangan bagi umat manusia dan terjaminnya setiap individu untuk memperoleh pangan, dicetuskan dalam Konferensi FAO tahun 1984 seperti yang diungkapkan oleh Soetrisno (1995). Pada *International Congress of Nutrition (ICN)* yang diadakan di Roma pada tahun 1992, definisi ketahanan pangan telah diperbaharui oleh Suhardjo (1996) yaitu rumah tangga dianggap memiliki ketahanan pangan apabila mereka memiliki kemampuan untuk secara konsisten memastikan kecukupan pangan bagi seluruh anggota keluarga mereka, yang memungkinkan mereka untuk hidup sehat serta menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Menurut Soetrisno (1997), dalam sidang *Committee on World Food Security* tahun 1995, definisi tersebut telah diperluas untuk memasukkan persyaratan bahwa konsep ketahanan pangan haruslah dapat diterima dan terintegrasi dengan budaya lokal. Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan Dunia dan Rencana Tindak Lanjut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia tahun 1996 mempertegas definisi tersebut. Dikatakan bahwa ketahanan pangan tercapai ketika semua individu, tanpa kecuali, memiliki akses yang memadai secara fisik dan ekonomi terhadap makanan yang mencukupi, aman, dan bernutrisi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi dan gaya hidup aktif serta sehat sesuai dengan preferensi masing-masing.

Pada tahun 1996, Loka Karya Ketahanan Pangan Rumah Tangga menghasilkan rumusan konsep tentang ketahanan pangan rumah tangga. Konsep ini mendefinisikan ketahanan pangan rumah tangga sebagai kemampuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi anggota keluarga secara berkesinambungan dan kontinu dari waktu ke waktu. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara, baik melalui produksi sendiri maupun pembelian, dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, serta variasi makanan yang sesuai dengan konteks lingkungan setempat dan juga aspek sosial budaya yang melekat dalam rumah tangga. Di Indonesia, konsep ketahanan pangan, yang dilegitimasi dalam rumusan Undang-Undang

Pangan No. 7 tahun 1996, telah memasukkan aspek keamanan, mutu, dan keragaman sebagai kondisi yang harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk secara cukup, merata, dan terjangkau.

Ketahanan pangan, menurut Soehardjo (1996), merupakan konsep yang dapat diuraikan pada berbagai tingkatan, baik secara regional (daerah), nasional, global, maupun pada tingkat rumah tangga dan individu. Di sisi lain, Simatupang (1999) mengemukakan bahwa ketahanan pangan terdiri dari hierarki sistem yang mencakup skala regional (daerah), nasional, global, komunitas lokal, rumah tangga, dan individu. Walaupun demikian, keberadaan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga tidak dapat dipandang sebagai jaminan mutlak untuk mencapai ketahanan pangan individu secara menyeluruh. Aspek-aspek seperti bagaimana pangan dialokasikan dan diolah di dalam rumah tangga, kondisi kesehatan anggota keluarga, serta keberadaan lingkungan yang bersih dan sehat, semuanya memiliki peran krusial dalam menghubungkan ketahanan pangan individu dengan keadaan rumah tangga. Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dari aspek budaya yang memengaruhi pola makan, dan ketersediaan infrastruktur lokal juga turut berperan dalam menentukan tingkat ketahanan pangan baik pada tingkat individu maupun rumah tangga.

Menurut pernyataan Simatupang (1999), walaupun menjadi prasyarat penting, keberlanjutan ketahanan pangan di tingkat komunitas lokal tidak dapat secara otomatis menjamin bahwa semua rumah tangga akan memiliki akses yang memadai terhadap pangan. Sebagaimana diungkapkan, ketahanan pangan di tingkat regional dianggap sebagai prasyarat yang diperlukan bagi keberlanjutan ketahanan pangan di tingkat komunitas lokal. Namun, penting untuk digugat bahwa hal ini tidak serta merta menjamin kelangsungan ketahanan pangan di tingkat komunitas lokal. Pada akhirnya, meskipun ketahanan pangan di tingkat nasional dianggap sebagai faktor yang krusial, hal tersebut tidaklah cukup untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap sumber pangan yang diperlukan guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif secara konsisten.

Penting untuk memperhatikan aspek-aspek seperti jumlah keamanan, kualitas, produksi, keberagaman budaya lokal, serta pelestarian lingkungan dalam seluruh tahapan produksi serta akses pangan. Hal ini berkaitan dengan ide memastikan bahwa kebutuhan pangan bagi setiap individu terjamin dan terpenuhi secara optimal. Konsep ketahanan pangan, yang meliputi berbagai aspek, menegaskan bahwa prinsip ini bertujuan untuk menjamin pasokan pangan yang memadai bagi populasi manusia, sambil memperhatikan kebutuhan individu agar dapat

menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Dalam merumuskan kebijakan atau melakukan kajian empiris terkait ketahanan pangan, penting untuk menerapkan konsep tersebut dengan memperhatikan struktur hierarkis yang mencakup berbagai tingkatan sasaran, dimulai dari skala individu, komunitas, keluarga, regional, nasional, hingga global.

Indeks Ketahanan Pangan

Badan Pangan Nasional bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan terkait ketahanan pangan. Dalam upaya meningkatkan penyediaan data dan informasi, BPN mengembangkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Proses penyusunan IKP mengambil acuan dari indeks global, seperti *Global Food Security Index* (GFSI), dengan menyesuaikan dengan data dan informasi yang tersedia di kabupaten/kota dan provinsi. Fokus utama penyusunan IKP Nasional adalah untuk menilai pencapaian ketahanan pangan di berbagai wilayah, serta memberikan peringkat terhadap tingkat ketahanan pangan di berbagai wilayah tersebut.

Ketahanan Pangan adalah keadaan di mana kebutuhan akan pangan, mulai dari tingkat negara hingga individu, terpenuhi secara memadai. Hal tersebut dicirikan oleh ketersediaan pangan yang mencukupi dalam jumlah dan kualitas yang memadai, aman, beragam, bergizi, dan terjangkau, serta sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, kepercayaan, dan budaya masyarakat. Ini memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan suatu wilayah dan faktor-faktor yang memengaruhinya, telah dikembangkan sistem penilaian berupa Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi dan subsistem ketahanan pangan.

Adapun indikator-indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1) Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih

Indikator ini mencakup perbandingan antara jumlah konsumsi normal per kapita dan produksi bersih dari komoditas bahan pangan yang tersedia. Produksi bersih diperkirakan setelah memperhitungkan berbagai potensi kehilangan seperti susut, tercecer, dan penggunaan untuk keperluan non-pangan.

2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Indikator ini mengevaluasi persentase masyarakat yang pengeluaran rupiahnya per bulan tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimum kebutuhannya untuk hidup secara

layak. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan seringkali menghadapi keterbatasan daya beli yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang berpengaruh pada tingkat ketahanan pangan.

3) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

Indikator ini mengukur jumlah pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dari keseluruhan total pengeluaran. Distribusi pengeluaran ini menjadi proksi penting untuk menggambarkan tingkat ketahanan pangan.

4) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Indikator ini menunjukkan seberapa banyak rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik. Ketersediaan listrik di suatu wilayah mempengaruhi peluang akses terhadap pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya memengaruhi kondisi ketahanan pangan.

5) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

Indikator ini mencerminkan tingkat pendidikan perempuan yang berpengaruh signifikan terhadap status kesehatan dan gizi. Tingkat pendidikan ini memengaruhi pengetahuan dan praktik pangan rumah tangga, dan akhirnya memengaruhi tingkat ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009).

6) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Indikator ini mengukur seberapa banyak rumah tangga tanpa akses ke air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Ketersediaan air bersih sangat penting dalam pencapaian ketahanan pangan, dan kekurangan akses ini dapat mempengaruhi kesehatan dan ketersediaan pangan rumah tangga.

7) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

Indikator ini mengukur ketersediaan tenaga kesehatan dalam suatu wilayah relatif terhadap jumlah penduduk dan kepadatan penduduknya. Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sehingga berdampak pada masalah gizi, serta dapat memberikan pemahaman mengenai pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Perbandingan ini dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kerentanan pangan (Lubis 2010; Sofiati 2010).

8) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)

Indikator ini mencerminkan status gizi balita dan menjadi penanda yang baik untuk menilai penyerapan pangan di suatu wilayah (Pemprov NTT et al. 2015). Tingkat stunting pada balita merupakan indikasi kurangnya asupan gizi yang memadai, yang dapat memengaruhi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

9) Angka harapan hidup pada saat lahir

Indikator ini mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup di berbagai wilayah. Peningkatan angka harapan hidup menunjukkan perbaikan dalam kualitas konsumsi pangan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga mencerminkan peningkatan berbagai akses dan kualitas kesehatan di wilayah tersebut.

Adapun pengelompokkan indikator pada aspek-aspek ketahanan pangan yaitu :

Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Keterjangkauan Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan
• Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih	• Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan • Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran • Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	• Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun • Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih • Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk • Persentase balita stunting • Angka harapan hidup pada saat lahir

Adapun formula untuk menghitung indeks ketahanan pangan yaitu :

$$Y(j) = \sum_i^9 a_i X_{ij}$$

Dimana :

i = Indikator ke-1, 2, ... 8, dan 9

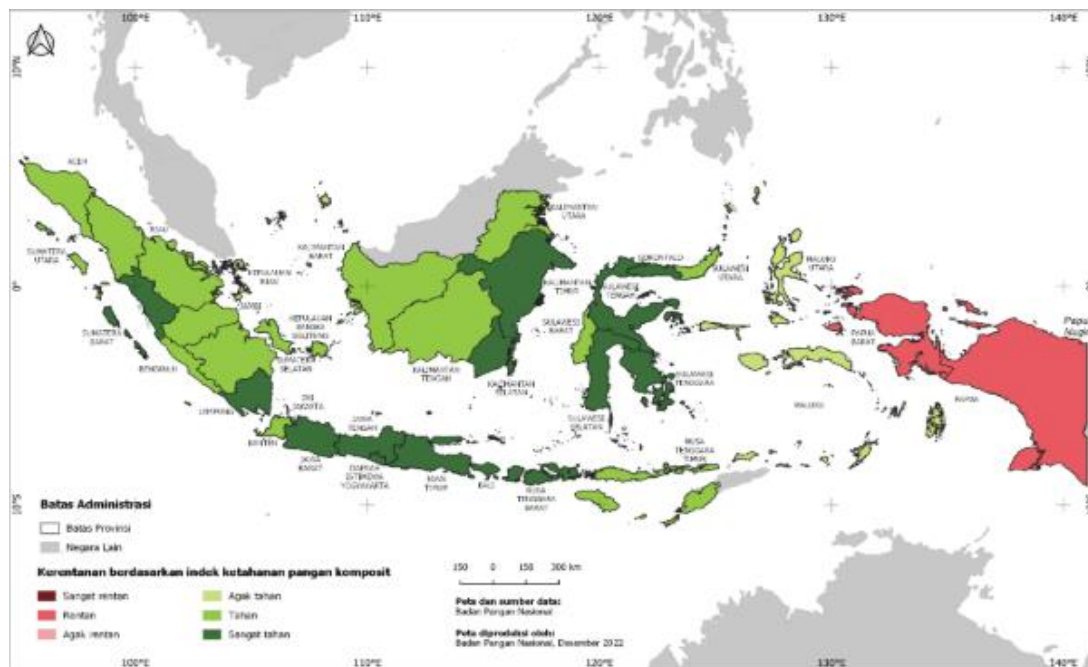
j = Kabupaten ke-1, 2, ... ; kota ke-1, 2, ...

$Y(j)$ = IKP kabupaten/kota ke-j

a_i = Bobot masing-masing indikator ke-i

X_{ij} = Nilai standarisasi indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

Peta IKP Provinsi 2022



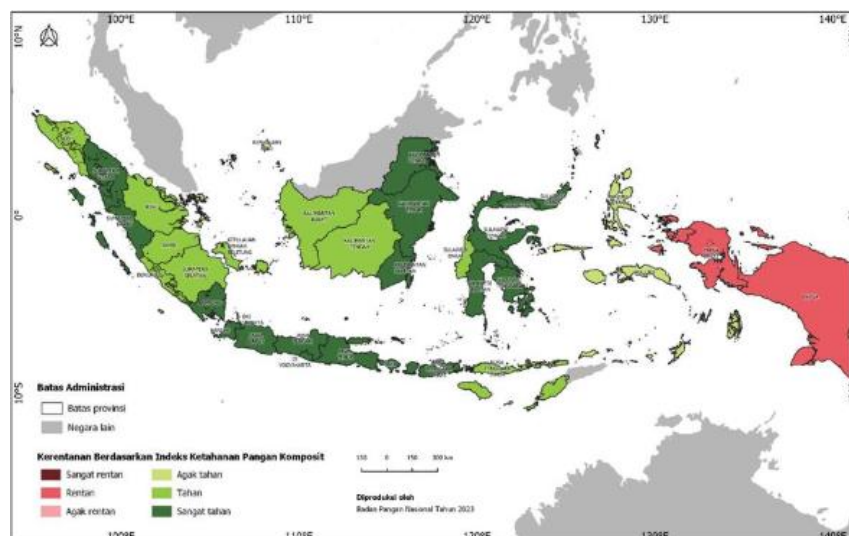
Sumber : BPN 2022

Tabel Peringkat dan IKP Provinsi 2022

Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	85,19	18	Banten	73,78
2	Jawa Tengah	82,95	19	Kep. Bangka Belitung	71,71
3	Sulawesi Selatan	81,38	20	Sumatera Utara	71,22
4	Kalimantan Selatan	81,05	21	Kalimantan Utara	71,04
5	DI Yogyakarta	80,88	22	Kalimantan Barat	70,81
6	Gorontalo	80,35	23	Aceh	70,16
7	Jawa Timur	79,85	24	Kalimantan Tengah	69,96
8	Sumatera Barat	79,45	25	Sumatera Selatan	69,64
9	Lampung	78,61	26	Jambi	69,50
10	DKI Jakarta	78,25	27	Nusa Tenggara Timur	68,42
11	Kalimantan Timur	77,65	28	Bengkulu	67,99
12	Jawa Barat	77,55	29	Riau	67,59
13	Nusa Tenggara Barat	76,58	30	Kep. Riau	63,83
14	Sulawesi Tengah	75,92	31	Maluku	60,20
15	Sulawesi Tenggara	75,04	32	Maluku Utara	58,39
16	Sulawesi Utara	74,30	33	Papua Barat	45,92
17	Sulawesi Barat	74,04	34	Papua	37,80

Sumber : BPN 2022

Peta IKP Provinsi 2023



Sumber : BPN 2023

Tabel Peringkat dan IKP Provinsi 2023

Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	87,65	18	Sulawesi Tenggara	74,96
2	Jawa Tengah	84,80	19	Kalimantan Utara	74,59
3	DKI Jakarta	83,80	20	Sumatera Selatan	73,82
4	Sulawesi Selatan	83,36	21	Sulawesi Barat	73,03
5	Sumatera Barat	83,22	22	Aceh	72,96
6	DI Yogyakarta	83,17	23	Bengkulu	72,27
7	Jawa Timur	82,46	24	Kalimantan Barat	72,20
8	Jawa Barat	82,19	25	Jambi	72,17
9	Gorontalo	81,63	26	Nusa Tenggara Timur	71,25
10	Lampung	81,56	27	Kep. Bangka Belitung	71,14
11	Kalimantan Selatan	81,26	28	Kalimantan Tengah	68,90
12	Kalimantan Timur	79,29	29	Riau	68,68
13	Banten	78,71	30	Kep. Riau	65,10
14	Sulawesi Utara	77,32	31	Maluku	64,37
15	Nusa Tenggara Barat	76,51	32	Maluku Utara	62,34
16	Sumatera Utara	75,97	33	Papua Barat	47,95
17	Sulawesi Tengah	75,83	34	Papua	42,27

Sumber : BPN 2023

Pendekatan dan Strategi Ketahanan Pangan

Pendekatan ketersediaan pangan merupakan hal penting yang mendasari ketahanan pangan. Ketersediaan pangan yang memadai untuk semua penduduk agar dapat bertahan hidup, beraktivitas, dan sehat merupakan definisi dari ketahanan pangan. Sementara itu, pendekatan kepemilikan berarti bahwa terdapat akses setiap rumah tangga atau individu terhadap pangan. Semakin tinggi aksesnya, maka semakin tinggi pula ketahanan pangannya (Simatupang, 1999). Selain ketersediaan dan kepemilikan, ketahanan pangan juga seringkali dikaitkan dengan stabilitas harga pangan terkhusus pangan pokok utama. Sehingga, ada tiga hal utama dalam ketahanan pangan yaitu keterediaan, akses, dan keterjangkauan (Syaukat, 2011).

Terdapat kondisi dimana suatu negara mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dinamakan kemandirian atau swasembada pangan. Swasembada pangan merupakan strategi yang ampuh untuk mewujudkan

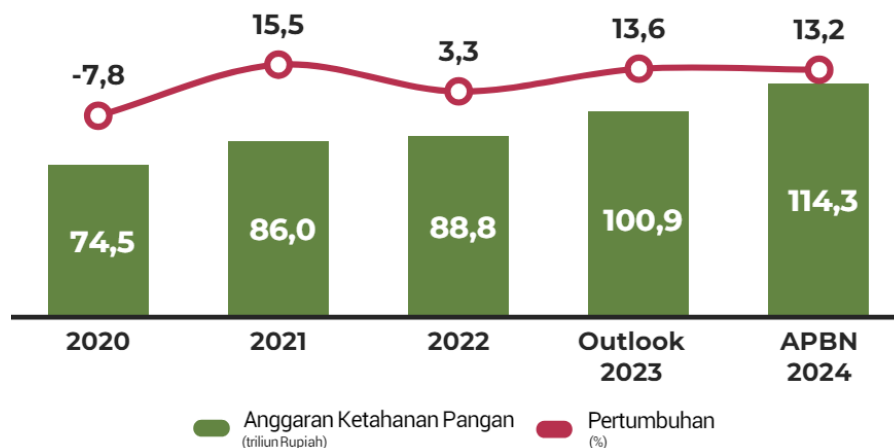
ketahanan pangan suatu negara. Maka dapat dikatakan bahwa, suatu negara yang berusaha dalam kemandirian atau swasembada pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan harus meminimalisir kegiatan impor, dan hanya melakukan impor pangan apabila ketersediaan pangan di pasar lokal dirasa dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Semenjak orde baru, kebijakan ketahanan pangan di Indonesia tidak banyak yang berubah sampai sekarang yaitu dengan pendekatan ketersediaan pangan (*Food Ability Approach*) atau FFA. Paradigma FFA menyatakan bahwa ketahanan pangan suatu negara ditentukan oleh kemampuan negara dalam menyediakan pangan pokok untuk seluruh penduduk, namun kurang memperhatikan aspek akses dan distribusi pangan. Pendekatan FFA dalam ketahanan pangan beranggapan bahwa pedagang akan menyalurkan pangan dengan efisien dan harga yang stabil apabila pasokan pangan tersedia. Pendekatan FFA dalam mewujudkan ketahanan pangan menyebabkan pemerintah Indonesia selalu berfokus pada strategi jangka pendek dan menengah berupa stabilisasi harga beras atau pangan utama di Indonesia dan strategi jangka panjang berupa swasembada beras (Simatupang, 2007).

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan intensifikasi pertanian selama bertahun-tahun atas upaya swasembada pangan berupa pembangunan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk dan benih, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani dan lainnya dengan fokus untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan menjaga agar harga pangan tetap stabil (Purwaningsih, 2008). Pada tahun 2024, mengenai anggaran ketahanan pangan memiliki tantangan berupa hasil produksi pangan yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur pertanian, terbatasnya SDM pertanian, gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), perubahan iklim, juga wabah yang menyerang hewan ternak. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan kedepannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan pada bidang ketahanan pangan, yaitu:

1. Peningkatan produksi domestik, dilakukan dengan penyaluran sarana prasarana produksi, penguatan riset dan kapasitas petani maupun nelayan, pengendalian OPT, dan optimalisasi lahan.
2. Penguatan kelembagaan petani, dilakukan dengan korporasi petani, pemberian subsidi, serta mengeluarkan asuransi pertanian untuk melindungi usaha tani.
3. Percepatan pembangunan dan infrastruktur pangan.
4. Pengembangan kawasan *Food Estate* (Sentra Produksi Pangan).
5. Penguatan cadangan pangan nasional.

Berikut merupakan grafik anggaran ketahanan pangan yang diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan mulai dari tahun 2020 sampai 2024.



Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2024

Dari data Kementerian Keuangan, anggaran ketahanan pangan yang tersebar di berbagai kementerian dan Lembaga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 mencapai 114,3 triliun Rupiah dan naik 13,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang lebih difokuskan untuk akses, peningkatan persediaan, dan stabilisasi harga pangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep atau definisi ketahanan pangan sangat luas dan beragam. Namun demikian dari luas dan beragamnya konsep ketahanan pangan tersebut intinya adalah terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas. Untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan suatu wilayah dan faktor-faktor yang memengaruhinya, telah dikembangkan sistem penilaian berupa Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi dan subsistem ketahanan pangan berupa: (1) Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih; (2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; (3) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran; (4) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik; (5) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; (6) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; (7) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; (8) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); (9) Angka harapan hidup pada saat lahir. Pada tahun 2024, mengenai anggaran ketahanan pangan

memiliki tantangan berupa hasil produksi pangan yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur pertanian, terbatasnya SDM pertanian, gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), perubahan iklim, juga wabah yang menyerang hewan ternak. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan kedepannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan pada bidang ketahanan pangan yaitu peningkatan produksi domestik, penguatan kelembagaan petani, percepatan pembangunan dan infrastruktur pangan, pengembangan kawasan Food Estate, dan penguatan cadangan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M.; H.P. Saliem, S.H. Suhartini; Wahida dan M.H. Sawit. (2000). *Dampak Krisis Ekonomi terhadap Konsumsi Pangan Rumah Tangga*. Laporan Penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Braun, V.J.; H.Bouis; S.Kumar and R.Pandya-Lorch. (1992). *Improving Food Security of The Poor: Concept, Policy and Programs*. IFPRI, Washington, DC.
- Khan REA and Gill AR. (2009). Determinants of food security in rural areas of Pakistan. *MPRA Paper No. 17146*.
- Lubis R. (2010). *Analisis wilayah rawan pangan dan gizi dalam perspektif perencanaan wilayah (studi kasus Bogor)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme. (2015). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015*. Jakarta: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme.
- Purwaningsih, Y (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Pemrasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9, No. 1, hal. 1-27.
- Reutlinger, S. 1987. *Food Security and Poverty in Developing Countries*. In Food Policy, Edited by Gitinger, J.P. et al/. Published for The World Bank. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Simatupang, P (2007). Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 25 No. 1, hal. 1-18.
- Simatupang, P. 1999. Toward Sustainable Food Security: The Need for A New Paradigm in Simatupang, P. et al/. (eds) *Indonesia's Economic Crisis: Effects on Agriculture and Policy*

- Responses*. 1999. Centre for International Economic Studies, University of Adelaide 5005 Australia.
- Soekirman. (1996). *Ketahanan Pangan: Konsep, Kebijakan dan Pelaksanaannya*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga, Yogyakarta, 26-30 Mei.
- Soetrisno, N. (1995). *Ketahanan Pangan Dunia. Konsep, Pengukuran dan Faktor Dominan*. Majalah Pangan No.21. Vol. V.
- Sofiati EL. (2010). *Analisis kerawanan pangan di tingkat kecamatan Bogor*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Susanto, D. (1997). *Dinamika Perilaku dan Kebiasaan Makan. Makalah Pra Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI. Konsumsi dan Kebiasaan Makanan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Per-anian dan Biro Perencanaan Depar-temen Pertanian. Jakarta.
- Syaukat, Y. (2011). *Dampak Ekonomi Kebijakan Produksi dan Perdagangan Pangan terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*. Dalam M. Firdaus, & dkk, *Ekonomi dan Manajemen Ketahanan Pangan*. Bogor: IPB Press.
- Tono, dkk. (2023). Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran dari Penilaian dengan Kriteria Global dan Nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1).